

## Analisis Manajemen Piutang Untuk Meminimalkan Risiko Piutang Tak Tertagih Pada Organisasi INKINDO Sumatera Barat

Milla Rizky Anggraeni<sup>1</sup>, Josephine Sudiman<sup>2</sup>, Lisa Amelia Herman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Email : [millarizkyanggraeni@gmail.com](mailto:millarizkyanggraeni@gmail.com)

Email : [josephine.sudiman@gmail.com](mailto:josephine.sudiman@gmail.com)

Email : [lisaamelia@pnp.ac.id](mailto:lisaamelia@pnp.ac.id)

---

### ABSTRACT

*The Indonesian Consultants National Association (INKINDO) is one of the associations of consulting services companies in Indonesia. In carrying out organizational activities, INKINDO West Sumatra requires members to pay membership dues every year which results in bad debts being collected by member. The purpose of this research is to find out the factors that cause uncollectible accounts in the West Sumatra INKINDO organization. The type of data used in this study is primary data. The data collection technique used was document data collection and questionnaire distribution to members of INKINDO West Sumatra. The data analysis method used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the factors causing the emergence of uncollectible accounts among members of INKINDO West Sumatra are the uneven distribution of packages obtained by members, the absence of recapitulation of member receivables each year, the nominal amount of membership dues each year, fines for not participating in organizational activities which are quite large and income imbalance and operating expenses that must be borne by members.*  
**Keywords :** Non Profit, Uncollectable Account Receivable

### ABSTRAK

Organisasi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) adalah salah satu asosiasi perusahaan jasa konsultan yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan organisasi, INKINDO Sumatera Barat mewajibkan anggota untuk membayar iuran keanggotaan setiap tahun yang menimbulkan adanya piutang tak tertagih anggota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya piutang tak tertagih pada organisasi INKINDO Sumatera Barat. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan pengumpulan data dokumen dan penyebaran kuisioner kepada anggota INKINDO Sumatera Barat. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab munculnya piutang tak tertagih pada anggota INKINDO Sumatera Barat adalah kurang meratanya paket yang diperoleh oleh anggota, tidak adanya rekapitulasi piutang anggota setiap tahun, besarnya nominal iuran anggota setiap tahun, denda karena tidak mengikuti kegiatan organisasi yang cukup besar dan ketidakseimbangan pendapatan dan beban operasional yang harus ditanggung oleh anggota.

**Kata Kunci :** Non Laba, Piutang Tak Tertagih

---

## **Pendahuluan**

Organisasi non laba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpaada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba [1]. Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang- undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa petugas pemerintah. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Bagi tiap-tiap jenis organisasi, sistem perencanaan berbeda-beda tergantung pada tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang mempengaruhi. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian dan kestabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, maka diperlukan sistem perencanaan yang semakin kompleks dan canggih.

Piutang merupakan tagihan berupa uang atau bentuk lainnya kepada seseorang atau sebuah perusahaan. Piutang usaha pada suatu organisasi pada umumnya merupakan bagian terbesar dari aset lancar serta bagian terbesar dari total aset perusahaan atau organisasi. Pemberian piutang mengandung risiko bagi organisasi yaitu kerugian apabila debitur tidak membayar kewajibannya. Oleh karena itu pengendalian *intern* terhadap piutang sangat penting. Kecurangan dalam suatu siklus kerja juga sering terjadi sehingga dapat merugikan atau organisasi. Kecurangan yang mungkin terjadi pada bagian piutang usaha adalah tidak dicatatnya piutang dari debitur, melakukan pembukuan palsu atas mutasi piutang dan lain sebagainya.

Organisasi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) merupakan salah satu asosiasi perusahaan jasa konsultan yang ada di Indonesia yang didirikan pada tanggal 20 Juni tahun 1979. Hingga tahun 2021, INKINDO Sumatera Barat memiliki anggota organisasi sejumlah 168 Badan Usaha yang bergerak dalam berbagai bidang jasa konsultan konstruksi dan non konstruksi. Dalam melakukan aktivitas operasional organisasi, badan usaha dibawah naungan INKINDO Sumatera Barat diwajibkan membayar iuran tahunan. Pembayaran bisa dilakukan secara angsuran dalam kurun waktu 1 tahun. Jika ingin menjadi anggota dari INKINDO Sumatera Barat, calon anggota harus membayar uang masuk serta uang pembagunan yang pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dalam kurun waktu 2 tahun.

Setiap tahunnya piutang INKINDO Sumatera Barat selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat merugikan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Piutang tidak tertagih dalam setiap tahun terjadi dikarenakan adanya Badan Usaha yang tidak mengikuti prosedur organisasi, diantaranya beberapa Badan Usaha yang sudah tidak beroperasi, ada juga Badan Usaha yang sudah bangkrut sehingga tidak dapat membayar piutang, Badan Usaha yang tidak mengetahui jumlah pasti kewajiban yang harus dibayar setiap tahunnya. Disertai dengan lemahnya dalam penagihan kepada Badan Usaha yang mana di bagian keuangan organisasi INKINDO Sumatera Barat tidak berjalan dengan efektif.

Alasan peneliti memilih INKINDO Sumatera Barat adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan timbulnya piutang tak tertagih untuk mengetahui cara penagihan piutang tak tertagih pada organisasi, untuk mengetahui keefektifan penagihan piutang tak tertagih dan untuk mengetahui pengendalian *intern* yang dilakukan INKINDO Sumatera Barat untuk meminimalisir piutang tak tertagih. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berasal dari instrument penelitian berupa kuisisioner. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh menggunakan dokumen dan kuisisioner. Untuk analisis data peneliti menggunakan reduksi data dan penyajian data.

### **Piutang**

Instrumen keuangan adalah pengakuan dan pengukuran, pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali beberapa hal yang telah diatur dalam PSAK tersebut [2]. Piutang ialah klaim suatu perusahaan pada pihak lain [3]. Piutang merupakan pemberian kelonggaran yang diberikan perusahaan kepada pelanggan dalam membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Piutang dagang atau piutang usaha merupakan piutang atau tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit.

Piutang merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan berpengaruh pada likuiditas sebuah perusahaan atau organisasi. Hal ini dikarenakan piutang termasuk dalam kategori aset lancar dan diharapkan dalam waktu singkat tanpa adanya pencatatan dan pengawasan yang baik, kesalahan dan penyelewengan terhadap piutang tersebut akan mudah terjadi. Oleh karena itu pimpinan organisasi harus dapat menetapkan prosedur serta metode akuntansi yang akan digunakan, pemilihan pelanggan yang layak, penagihan secara berkala kepada pelanggan serta pencatatan akuntansi yang memadai sehingga kesalahan dan penyelewengan terhadap piutang serta kerugian akibat piutang yang tak tertagih dapat dihindari. Piutang timbul karena adanya pengakuan kepada pihak lain diwaktu sebelumnya dalam bentuk uang, barang, jasa atau dalam bentuk piutang usaha yang harus dilakukan penagihan (*collect*) pada tanggal jatuh temponya [10].

Piutang juga dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki hak penagihan piutang terhadap pihak lain yang tertunggak dan berharap pembayaran dari mereka agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan. Jenis piutang dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu piutang usaha (*account receivable*), piutang wesel (*notes receivable*) dan piutang lainnya (*other receivable*) [11]. Untuk piutang usaha adalah piutang yang sudah tidak dapat ditagihkan kepada pihak yang bersangkutan contohnya *customer* bangkrut, meninggal, pailit atau lainnya sehingga piutang tersebut harus dihapuskan dan piutang tersebut menjadi biaya bagi perusahaan. Resiko yang terjadi dalam piutang usaha dalam suatu perusahaan diantaranya adalah resiko tidak dibayarkannya seluruh piutang untuk perusahaan adalah resiko paling berat yang harus diterima perusahaan karena tagihan yang telah sesuai dengan yang direncanakan dan disusun untuk diterima dimasa yang

akan dating ternyata tidak dapat diterima Kembali sebagai kas atau sebagai pendapatan perusahaan [12].

### **Penghapusan Piutang Tak Tertagih**

Terdapat beberapa metode penghapusan piutang yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah metode penghapusan langsung (*direct write off method*), metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang relative baru berdiri, yang belum memiliki cukup data – data historis tentang piutang – piutangnya. Atau perusahaan yang Sebagian kecil saja penjualannya dilakukan secara kredit. Yang kedua adalah metode pencadangan (*allowance method*) yaitu Ketika penjualan kredit terjadi, estimasi mengenai besarnya piutang yang tidak dapat ditagih dibuat. Karena perusahaan belum dapat mengetahui mana dari pelanggan yang tidak bisa membayar maka perusahaan tidak akan menghapus (mengkredit) piutang usahanya secara langsung. Satu hal yang perusahaan dapat prediksi adalah bahwa berdasarkan pengalaman masa lampau selalu ada pelanggannya yang tidak bisa membayar. Dengan menggunakan metode pencadangan, besarnya estimasi atas beban piutang yang tak tertagih akan diakui (dicatat) dalam periode yang sama sebagaimana penjualan kredit dicatat tanpa harus menunggu terjadinya *actual loss* yang mungkin baru terjadi setelah periode penjualan berlangsung [17].

### **Kerugian Piutang Tak Tertagih**

Piutang usaha yang tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan, melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun, penurunan asset piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham. Kerugian pendapatan dan penurunan laba diakui dengan mencatat beban piutang ragu – ragu (atau beban piutang tak tertagih). Beban piutang tak tertagih merupakan biaya bagi penjual yang memberikan kredit [16].

### **Pengendalian Intern**

*Intern* adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan seperti keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku [4]. Tujuan dari sistem pengendalian *intern* adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Pihak – pihak yang akan bertanggung jawab atas pengendalian *intern* antara lain adalah manajemen, dewan komisaris dan komite audit, auditor *intern* dan personil lain entitas, auditor independent dan pihak luar lain. Manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian *intern* organisasinya. Dewan komisaris dan komite audit bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggungjawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern. Bagi auditor intern, mereka memiliki tanggungjawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian

*intern* entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya. Untuk personil lain entitas memiliki peran dan tanggungjawab semua personil lain yang menyediakan informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian *intern* harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik. Auditor independent sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian *intern* kliennya sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit, atau dewan komisaris. Dan yang terakhir bagi pihak luar lain bertanggung jawab atas pengendalian *intern* entitas adalah badan pengatur seperti bank Indonesia dan BAPEPAM [7].

### **Komponen Pengendalian Internal**

Komponen pengendalian internal dibagi menjadi lima komponen. Yang pertama adalah prosedur pengendalian. Dalam melakukan pengendalian internal tentunya ada prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk pengendalian internal tetap berjalan sesuai yang sudah direncanakan. Adanya prosedur ini juga sebagai pencegahan terhadap kecurangan dan kesalahan dalam aktivitas perusahaan. Prosedur dalam pengendalian internal meliputi karyawan yang berpotensi, rotasi kinerja dan kewajiban cuti, ulasan kerja, pemisahan fungsi dan tanggung jawab serta perlindungan aset dan data akuntansi. Yang kedua adalah pengawasan. Pengawasan berfungsi untuk memastikan agar semua aktifitas di dalam pengendalian internal berjalan sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga membuat manajemen perusahaan dapat melakukan identifikasi suatu hal yang dapat menentukan tindakan yang efektif untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini pengawasan dapat dilakukan dengan dua cara seperti penilaian khusus atau audit internal maupun keuangan dan melakukan identifikasi langsung dari sinyal peringatan dengan karyawan yang bersangkutan dan juga sistem akuntansi [7].

Yang ketiga adalah penilaian risiko. Setiap aktivitas yang dilakukan pasti memiliki risiko di dalamnya. Risiko ini bisa saja berkaitan dengan bisnis secara langsung ataupun tidak. Dalam hal ini perusahaan menilai risiko dengan manajemen perusahaan yang dilakukan dengan analisis, tindakan dan evaluasi. Yang keempat adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan seluruh aspek mulai dari perilaku, struktur dan pedoman yang ada pada sebuah operasional perusahaan. Dengan adanya lingkungan pendendalian ini suatu perusahaan dapat menjadi lebih disiplin dan terstruktur. Beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian yaitu integritas dan nilai kode etik perusahaan, filosofi dan gaya operasional manajemen, struktur organisasi, praktik administrasi dan personal, kebijakan operasional dan komitmen pada kompetensi. Lingkungan pengendalian ini menjadi fondasi terhadap unsur – unsur yang membentuk pengendalian internal lainnya. Suatu organisasi jika tidak memiliki fondasi tentunya akan roboh karena tidak ada aturan yang berlaku dan integritas yang dimiliki organisasi tersebut. Yang terakhir adalah informasi dan komunikasi. Tanpa adanya informasi dan komunikasi tentunya akan sulit untuk melakukan segala pengendalian internal seperti pembentukan kebijakan, analisis risiko

serta pengawasan yang harus dilakukan. Informasi dan komunikasi ini dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kejadian atau kondisi yang mampu memberi pengaruh pada pengambilan keputusan dan hubungan eksternal perusahaan [7].

### **Unsur – Unsur Pengendalian Internal**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan perlu adanya system pengendalian internal. Sistem pengendalian internal tersebut memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah struktur memisahkan tanggungjawab fungsional yang merupakan kerangka untuk pembagian tanggung jawab secara fungsional pada unit organisasi yang dibentuk untuk kepentingan perusahaan. Pembagian tanggungjawab fungsional dalam organisasi dibagi menjadi dua prinsip yaitu dipisahkan antara fungsi – fungsi operasional dan penyimpangan dari fungsi akuntansi. Suatu fungsi sebaiknya dibatasi, tidak boleh melakukan tanggung jawab penuh untuk semua tahap transaksi. Selanjutnya adalah wewenang dan prosedur memberi upaya perlindungan. Dalam organisasi setiap transaksi hanya bisa terjadi karena adanya otoritas wewenang untuk menyetujui adanya transaksi. Oleh karena itu, di dalam sebuah organisasi harus ada sistem yang mengatur sebuah wewenang dalam setiap transaksi untuk melindungi kekayaan, uang, pendapatan dan biaya dalam organisasi tersebut.

Yang ketiga adalah praktek sehat dalam tugas organisasi. Dalam pembagian tugas dan fungsi di organisasi tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak adanya praktik yang sehat. Beberapa contoh praktik yang sehat dalam melaksanakan wewenang dan fungsi organisasi adalah pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, penggunaan formulir dengan nomor urut cetak yang penggunaannya dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang, transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal hingga akhir hanya satu orang. Dan yang terakhir adalah karyawan berkualitas. Dalam struktur organisasi seharusnya dibuat sistem pencatatan dan berbagai cara lain untuk mendorong praktik yang sehat dalam sebuah organisasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Hal tersebut menjadi unsur penting dalam organisasi. Beberapa cara agar organisasi dapat memiliki potensi dan dapat dipercaya adalah dengan cara menyeleksi calon karyawan berdasarkan kriteria berdasarkan kriteria yang berlaku di dalam sebuah organisasi dan dilakukan pengembangan pendidikan terhadap karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan [7].

### **Pengendalian Piutang**

Sebuah sistem piutang yang sehat, menguntungkan serta konstruktif harus didasarkan atas prosedur, praktek dan juga operasi yang layak. Hal ini dapat dicapai dengan adanya system pengendalian intern perusahaan. Secara umum prosedur pengendalian intern pada transaksi piutang, diantaranya adalah otorisasi yang semestinya atas transaksi dan kegiatan, pemisahan tugas yang mengurangi kesempatan yang memungkinkan seseorang dalam posisi yang dapat melakukan dan sekaligus menutupi kekeliruan atau ketidakberesan dalam pelaksanaan tugasnya sehari – hari sehingga diperlukan pemisahan tugas untuk pengendaliannya, perancangan dan penggunaan dokumen dan

catatan yang memadai untuk membantu pencatatan secara semestinya transaksi dan peristiwa, pengalaman yang cukup atas akses dan penggunaan asset perusahaan dan catatan, pengecekan secara independent atas pelaksanaan dan penilaian yang semestinya atas jumlah yang dicatat.

Aktivitas pengendalian piutang yang efektif dan efisien khusus digunakan dalam siklus pendapatan yaitu pemisahan tugas, supervisi, catatan akuntansi, pengendalian akses dan verifikasi independent [14]. Pemisahan tugas memastikan bahwa tidak ada satu orang atau departemen yang memproses transaksi sendiri secara keseluruhan. Supervisi perusahaan yang memiliki karyawan sedikit untuk dapat melakukan pemisahan fungsi tergantung pada supervisi untuk pengendaliannya. Catatan akuntansi merupakan fitur operasional yang penting, beberapa Teknik pengendalian. Antara lain adalah dokumen sumber yang bernomor, jurnal khusus, buku besar pembantu, buku besar umum dan file. Pengendalian akses merupakan pencegahan dan pendeteksian kecurangan atas asset perusahaan dan verifikasi independent berguna untuk meningkatkan dan verifikasi kebenaran dan kelengkapan dari proses oleh system. Pengelolaan piutang meliputi tiga tahap yaitu yang pertama menyangkut kondisi – kondisi yang menyebabkan timbulnya piutang, yang kedua adalah mengenai administrasi dan pengorganisasian piutang dan yang terakhir adalah menyangkut pelunasan piutang [15].

### **Klasifikasi Piutang**

Piutang dapat digolongkan menjadi 3 golongan berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah piutang usaha, piutang usaha merupakan sejumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 sampai 60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Piutang usaha merupakan piutang yang dihubungkan dengan aktivitas operasi normal sebuah bisnis, yaitu penjualan kredit barang atau jasa untuk pelanggan [8].

Yang kedua adalah piutang bukan dagang. Piutang yang dikelompokkan ke dalam piutang bukan dagang adalah piutang – piutang yang timbul dari penjualan barang – barang atau yang dihasilkan perusahaan. Piutang bukan dagang akan dilaporkan pada kelompok aset lancar apabila akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau dalam siklus usaha yang normal. Apabila pelunasannya lebih dari satu tahun atau melebihi siklus usaha yang normal akan dikelompokkan dalam aset lain – lain [8]. Dan yang ketiga adalah piutang penghasilan. Penggunaan dasar waktu (*accrual basic*) dalam akuntansi mengakibatkan adanya pengakuan terhadap penghasilan – penghasilan yang masih akan diterima. Penghasilan – penghasilan seperti itu diperoleh atas dasar waktu, sehingga pada akhir periode dihitung berapa jumlah tersebut dicatat sebagai piutang penghasilan. Biasanya piutang penghasilan akan diterima uangnya dalam jangka waktu yang relatif pendek sehingga dimasukkan dalam aset lancar [8].

### **Manajemen Piutang**

Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menjual produknya dengan kredit. Manajemen piutang terutama menyangkut masalah pengendalian jumlah piutang, pengendalian pemberian dan pengumpulan piutang dan evaluasi terhadap politik kredit yang dilakukan perusahaan. Manajer keuangan langsung mengawasi piutang dagang melalui keterlibatan dalam pengelolaan kebijakan kredit dan kebijakan penagihan [6]. Kebijakan kredit merupakan suatu penentu dalam penyeksian pemberian kredit, standar kredit dan syarat kredit. Sedangkan kebijakan penagihan, pendekatan perusahaan untuk mengelola setiap aspek piutang dagang sangat dipengaruhi oleh kondisi persaingan.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen piutang adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengendalikan dan memantau piutang agar piutang tidak menumpuk pada suatu tingkatan yang berlebihan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat arus kas. Dalam manajemen piutang itu sendiri juga terdapat pula mengenai keputusan akan adanya pemberian kredit atau tidak.

### **Piutang Tak Tertagih dan Faktor Penyebabnya**

Piutang tak tertagih adalah piutang yang timbul karena pihak debitur yang mungkin tidak dapat melakukan kewajibannya untuk membayar utang – utangnya. Piutang tak tertagih adalah piutang yang telah disepakati tidak dapat ditagih karena pelanggan bangkrut atau melarikan diri. Piutang tak tertagih adalah hak untuk menagih sejumlah uang dari penjual kepada pembeli karena adanya transaksi penjualan secara kredit yang belum atau tidak bisa dibayarkan tepat pada waktunya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa piutang tak tertagih adalah piutang tidak dapat ditagih lagi karena pelanggan tidak mampu melunasi kewajibannya dengan bangkrut atau melarikan diri [9].

Piutang tak tertagih dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu faktor – faktor yang berasal dari pihak kreditur yang terdiri dari lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit. Administrasi kredit merupakan pengelolaan mengenai pencatatan, penyimpanan dokumen dan pembuatan laporan yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit. Proses administrasi menghasilkan output berupa sistem informasi sebagai umpan balik bagi manajemen dalam melaksanakan tugasnya secara lengkap. Faktor Eksternal yaitu faktor – faktor yang berasal dari pihak debitur seperti kondisi ekonomi konsumen tidak mampu melunasi kewajibannya diakibatkan menurunnya pendapatan ekonomi karena semakin mahalnya bahan pokok. Konsumen mengalami musibah dan konsumen yang melarikan diri [9].

### **Penagihan Piutang**

Dalam proses penagihan piutang, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain adalah melalui surat. Perusahaan atau instansi dapat mengirim surat kepada pelanggan untuk mengingatkan bahwa piutangnya telah jatuh tempo. Apabila setelah beberapa hari

setelah dikirim surat pelanggan tersebut belum juga membayar utangnya, maka dapat dikirim surat yang kedua yang nadanya lebih teras. Selanjutnya adalah melalui telepon. Apabila melalui surat pelanggan tersebut belum juga membayar utangnya, bagian kredit dapat menelpon pelanggan tersebut secara pribadi untuk meminta pelanggan tersebut segera melunasi utangnya yang jatuh tempo. Berikutnya piutang dapat ditagih dengan cara kunjungan personal jika melalui surat dan telepon ternyata pelanggan belum juga membayar utangnya, maka dapat dilakukan kunjungan personal, cara ini dirasakan lebih efektif.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari persepektif partisipan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengelolaan piutang dalam upaya meminimalisir piutang tak tertagih. Populasi dari penelitian ini adalah 168 anggota INKINDO Sumatera Barat dan untuk sampel penelitian ini adalah 85 anggota INKINDO Sumatera Barat. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yang berasal dari instrumen penelitian berupa kuisisioner. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 cara, yaitu menggunakan dokumen keuangan yang dimiliki oleh INKINDO Sumbar dan hasil kuisisioner yang telah diisi oleh anggota INKINDO Sumbar.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 metode yaitu dokumen keuangan organisasi dan kuisisioner. Pada dokumen keuangan yang dimiliki INKINDO Sumbar, piutang anggota telah di rekap sejak tahun 2011, namun karena kurangnya staf pada bagian Keuangan menyebabkan data piutang setiap tahunnya tidak dilakukan pembaruan secara berkala. Sehingga untuk penelitian ini, peneliti mengambil data keuangan yang valid dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada kuisisioner peneliti memberikan 8 (delapan) pertanyaan yaitu nama Badan Usaha, Nama Direktur, email Badan Usaha, tahun bergabung, alasan bergabung dan memilih organisasi INKINDO, manfaat yang diperoleh anggota setelah menjadi anggota INKINDO, kendala yang dihadapi oleh anggota, kendala yang dialami anggota dalam proses pelunasan iuran, uang pangkal, kontribusi dan denda kegiatan organisasi dan harapan anggota kepada INKINDO untuk proses pelunasan iuran, uang pangkal, kontribusi dan denda kegiatan INKINDO.

### **Hasil dan Pembahasan**

Organisasi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sumatera Barat adalah organisasi non laba yang merupakan salah satu asosiasi perusahaan jasa konsultan terbesar yang ada di Indonesia dengan jumlah anggota secara nasional sebanyak 6.252 anggota yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Hingga tahun 2021, INKINDO Sumatera Barat telah memiliki anggota sebanyak 168 Badan Usaha yang bergerak dalam bidang jasa konsultansi baik konstruksi dan non konstruksi. INKINDO Sumatera Barat

membagi klasifikasi Badan Usaha anggota menjadi 2 klasifikasi yaitu klasifikasi kecil dan klasifikasi menengah.

Dalam menjalankan kegiatan organisasi, INKINDO Sumatera Barat mewajibkan anggotanya untuk membayar iuran tahunan, kontribusi pada setiap kegiatan organisasi, denda yang timbul akibat tidak mengikuti kegiatan organisasi dan uang pangkal untuk anggota baru yang bergabung dengan INKINDO Sumatera Barat. Untuk iuran tahunan anggota, INKINDO Sumatera Barat membaginya menjadi skala badan usaha anggota menjadi 2 klasifikasi dengan jumlah yang berbeda. Klasifikasi kecil dikenakan iuran sebesar Rp 1.650.000 dan untuk klasifikasi menengah dikenakan iuran sebesar Rp 2.950.000.

### **Sumber Munculnya Piutang pada Organisasi INKINDO Sumatera Barat**

Pada organisasi INKINDO, piutang muncul dikarenakan adanya iuran anggota, uang pangkal badan usaha dan kegiatan organisasi. Untuk iuran tahunan anggota akan dibayarkan oleh anggota setiap tahunnya dengan jumlah yang berbeda – beda, tergantung dari skala Badan Usaha dari anggota INKINDO itu sendiri. Hingga tahun 2021, INKINDO Sumatera Barat memiliki 2 jenis skala Badan Usaha, yaitu skala kecil dengan iuran Rp 1.650.000 dan skala menengah dengan iuran anggota sebesar Rp 2.550.000.

Untuk uang pangkal Badan Usaha timbul karena adanya anggota baru yang ingin menjadi anggota INKINDO Sumatera Barat, calon anggota INKINDO akan melengkapi berkas administrasi dan keuangan yang telah ditetapkan. Untuk menjadi anggota INKINDO, calon anggota akan dikenakan biaya sebesar Rp 18.900.000. Uang pangkal tersebut dapat dibayarkan dengan cara transfer ke rekening DPP INKINDO Sumatera Barat. Pembayaran dari uang pangkal Badan Usaha ini dapat dilakukan secara angsuran selama 2 tahun dengan tiga kali angsuran.

Dan untuk kegiatan Organisasi, INKINDO Sumatera Barat setiap tahunnya memiliki kegiatan organisasi tahunan antara lain adalah Forum Anggota (FORA), Penataran Kode Etik dan Tata Laku, Musyawarah Provinsi (MUSPROV), Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) dan pelatihan/seminar. Untuk menghadiri kegiatan tersebut, biasanya panitia kegiatan akan menentukan nominal tertentu kepada anggota untuk dibayarkan sebagai kontribusi anggota terhadap acara. Dan bagi anggota yang tidak mengikuti kegiatan tersebut akan dikenakan denda sesuai dengan Surat Keputusan yang telah dibuat oleh INKINDO Sumatera Barat.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Piutang Tak Tertagih pada INKINDO Sumatera Barat**

Faktor penyebab terjadinya piutang tak tertagih pada INKINDO Sumatera Barat terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal dipengaruhi oleh 2 sebab yaitu lemahnya pengawasan keuangan dari Sekretariat. Dalam menjalankan operasional organisasi, piutang anggota timbul karena tidak melakukan pembayaran iuran anggota tahunan, denda ketidakhadiran terhadap kegiatan yang diadakan oleh DPP INKINDO, uang pangkal menjadi anggota INKINDO, dan lain – lain.

Setiap piutang yang timbul akan diproses dan di catat oleh bagian keuangan. Di akhir tahun, bagian keuangan akan melakukan rekap piutang anggota per Badan Usaha dan dikirimkan satu per satu melalui *whatsapp* Badan Usaha. Dalam pengiriman rekap piutang Badan Usaha INKINDO, terkadang beberapa dari Badan Usaha INKINDO tidak merespon pesan yang dikirimkan. Beberapa Badan Usaha bahkan sudah tidak dapat dihubungi kembali. Terkadang beberapa Badan Usaha tidak mengetahui jumlah pasti tentang piutang mereka. Hal tersebut membuat staf keuangan mengirimkan kembali rincian piutang yang timbul per Badan Usaha.

Sebab yang kedua adalah karena kurang tegasnya pengurus dalam menindaklanjuti piutang anggota. Dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) INKINDO, jika anggota sudah tidak membayarkan iuran tahunan anggota selama 2 tahun berturut – turut maka DPP INKINDO berhak memberikan surat pemberitahuan. Setelah surat pemberitahuan diberikan, jika belum ada tindak lanjut dari anggota, maka anggota akan dikirimkan Surat Peringatan I (SP I). Surat Peringatan I (SP I) berlaku dalam 3 bulan kedepan, jika anggota belum memberikan tindak lanjut maka akan diberikan Surat Peringatan II (SP II). Jika anggota masih belum memberikan tanggapan, maka DPP INKINDO berhak memberikan Surat Peringatan III (SP III) dan saat DPP INKINDO memberikan Surat Peringatan III (SP III) kepada anggota, maka status keanggotaan yang bersangkutan telah dicabut. Hingga tahun 2022, DPPH INKINDO Sumatera Barat sudah mengeluarkan Surat Peringatan I (SP I) kepada anggota karena DPPH INKINDO Sumatera Barat masih beranggapan bahwa anggota akan mengangsur kewajibannya. Disisi lain, DPP INKINDO Sumatera Barat saat ini sedang dalam masa transisi dengan kepengurusan baru sehingga akan membutuhkan waktu untuk dapat merincikan piutang anggota beberapa tahun sebelumnya.

Untuk faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan bangkrutnya Badan Usaha. Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor timbulnya piutang tak tertagih pada Badan Usaha. Dalam menjalankan aktifitas Badan Usaha, anggota INKINDO harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tender dari pemerintah maupun pihak swasta. Karena adanya persaingan ini, beberapa Badan Usaha ada yang mengalami kebangkrutan karena tidak mendapatkan tender dalam bidang jasa konsultan. Karena tidak mendapatkan tender tersebut, membuat Badan Usaha tidak dapat menjalankan aktifitas Badan Usahanya, sehingga mengalami kebangkrutan. Yang kedua, Pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID – 19) yang melanda dunia di awal tahun 2020 cukup membuat dunia jasa konsultansi terpuruk. Banyak Badan Usaha yang tidak beroperasi di tahun 2020. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya jumlah anggota INKINDO Sumatera Barat yang membayar iuran tahunan anggota. Dari 168 Badan Usaha yang menjadi anggota INKINDO Sumatera Barat, hanya 98 (*sembilan puluh delapan*) dari Badan Usaha yang mampu membayar iuran keanggotaan di tahun 2021. Pandemi COVID – 19 membuat banyak Badan Usaha kesulitan untuk mendapatkan tender dari pemerintah maupun swasta. Sehingga membuat beberapa Badan Usaha tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Yang ketiga adalah ketidaktahuan anggota terhadap piutang yang timbul setiap tahunnya. Setiap akhir tahun, bagian keuangan akan merekap piutang dari masing – masing Badan Usaha anggota INKINDO Sumatera Barat. Rekap piutang tersebut akan dikirim satu per satu melalui *whatsapp* yang ditujukan langsung kepada Direktur Badan Usaha. Beberapa Badan Usaha akan mengkonfirmasi jumlah piutang mereka. Namun ada juga Badan usaha yang tidak mengetahui piutang yang terjadi sehingga menimbulkan pertanyaan dari Badan usaha tersebut kepada bagian keuangan INKINDO Sumatera Barat. Bagian keuangan nantinya akan menjelaskan kembali rincian piutang tersebut kepada Badan Usaha melalui telepon.

### **Rincian Piutang Tak Tertagih pada INKINDO Sumatera Barat**

Kategori piutang pada organisasi INKINDO Sumatera Barat dibagi menjadi empat bagian, antara lain piutang anggota yang masih bisa tertagih, piutang anggota yang tidak bisa tertagih, uang pangkal Badan Usaha yang masih bisa tertagih dan uang pangkal badan usaha yang tidak bisa tertagih. Dari 168 Badan Usaha yang terdaftar sebagai anggota INKINDO Sumatera Barat di tahun 2021, terdapat 85 anggota INKINDO Sumatera Barat yang memiliki piutang ke INKINDO Sumatera Barat dengan total piutang sebesar Rp 211.601.400. Hingga tahun 2021, jumlah anggota INKINDO Sumatera Barat yang memiliki piutang yang tidak dapat ditagih sejumlah 32 Badan Usaha dengan total piutang sebesar Rp 218.050.000. Untuk uang pangkal anggota yang masih bisa tertagih terdapat 46 Badan Usaha anggota INKINDO yang masih memiliki sisa dari uang pangkal menjadi anggota INKINDO Sumatera Barat dengan total Rp 387.175.000. Dan untuk Uang Pangkal Anggota yang Tidak Bisa Tertagih terdapat 24 Badan Usaha INKINDO Sumbang yang masih memiliki sisa uang pangkal. Beberapa dari Badan Usaha tersebut sudah tidak melakukan pembayaran uang pangkal anggota dalam kurun waktu beberapa tahun yang lalu. Dari 24 Badan Usaha yang belum melakukan pembayaran uang pangkal anggota menimbulkan piutang sebesar Rp 254.700.000.

### **Proses Penagihan Piutang Tak Tertagih pada INKINDO Sumbar**

Proses penagihan piutang tak tertagih pada INKINDO Sumatera Barat dilakukan melalui 3 cara, yaitu melalui pesan *whatsapp*, melalui telepon dan melalui surat resmi. Penagihan piutang melalui pesan *Whatsapp* staff keuangan akan membuat rincian kewajiban dari masing – masing anggota INKINDO Sumatera Barat dengan rinci selama tahun berjalan. Anggota INKINDO Sumatera Barat berhak melakukan pembayaran sepenuhnya atau hanya sebagian dari total piutang yang telah dirincikan oleh staff keuangan. Selanjutnya, melalui telepon staff keuangan akan melakukan panggilan telepon kepada anggota INKINDO Sumatera Barat untuk memastikan apakah rincian piutang tersebut telah diterima atau dibaca oleh anggota. Jika sudah diterima atau pesan *whatsapp* telah dibaca, maka staff keuangan akan menanyakan pembayaran piutang anggota INKINDO Sumatera Barat hingga tahun berjalan. Dan untuk penagihan piutang melalui surat, DPP INKINDO Sumatera Barat akan memberikan surat kepada anggota yang belum membayar kewajiban hingga tahun berjalan. Surat tersebut akan dikirim dalam 3 tahap

yaitu, Surat Pemberitahuan I, Surat Pemberitahuan II dan Surat Pemberitahuan III. Jarak antara pemberian Surat Pemberitahuan I hingga Surat Pemberitahuan III adalah selama 3 bulan. Jika anggota belum mengindahkan Surat Pemberitahuan tersebut, hingga mendapat Surat Pemberitahuan III, maka secara langsung anggota tersebut sudah dinonaktifkan sebagai anggota INKINDO Sumatera Barat.

### **Pengendalian Internal yang Dilakukan INKINDO Sumatera Barat untuk Meminimalkan Piutang Tak Tertagih**

Lingkungan pengendalian INKINDO Sumatera Barat memiliki *Standar Operating Procedur* (SOP) yang harus dijalankan setiap karyawan. SOP tersebut berbeda untuk masing – masing bagian karena *Job Description* tiap bagian berbeda. INKINDO Sumatera Barat hingga tahun 2020 memiliki 2 orang karyawan. Satu orang karyawan dibagian keuangan dan sertifikasi Badan Usaha dengan latar pendidikan S1 bidang komputer yang telah bergabung dengan INKINDO Sumatera Barat sejak tahun 2012 serta 1 orang di bagian *office boy* dengan latar belakang SMA yang telah bergabung dengan INKINDO Sumatera Barat sejak tahun 2016. Dalam menjalankan bagian keuangan, karyawan bagian SBU hanya melakukan sistem keuangan secara sederhana. Sehingga di tahun 2021, INKINDO Sumatera Barat melakukan perekrutan karyawan bagian keuangan dan sistem keuangan bisa berjalan sesuai dengan peraturan organisasi INKINDO.

Aktivitas pengendalian pada bagian keuangan di INKINDO Sumatera Barat berfungsi untuk pengecekan kas masuk organisasi, pengeluaran per bulan organisasi, laporan keuangan, pencatatan, penagihan dan pengarsipan berkas – berkas keuangan pada INKINDO Sumatera Barat termasuk piutang organisasi di setiap tahunnya. Dalam pembayaran iuran anggota dan piutang anggota, DPP INKINDO Sumatera Barat tidak menerima dalam bentuk setoran tunai. Semua pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening organisasi. Kewenangan untuk mengurangi dan menambah piutang dilakukan oleh bagian keuangan sesuai dengan rekening koran setiap bulan, bukti transfer pembayaran dari Badan Usaha baik itu Badan Usaha yang telah melakukan pembayaran dan belum melakukan pembayaran iuran anggota tahunan. Sedangkan untuk menjalankan aktifitas sekretariat, bagian keuangan akan mengajukan permohonan setiap bulannya. Pengajuan akan diajukan dan diperiksa oleh Sekretaris, Bendahara dan Ketua. Setelah disetujui, INKINDO Sumatera Barat akan mengeluarkan cek sejumlah pengajuan yang telah disetujui. Pemrosesan pembayaran dari Badan Usaha ke INKINDO Sumatera Barat dilakukan dengan konfirmasi melalui pesan *whatsapp* dengan melampirkan bukti transfer atau langsung menghubungi staf keuangan dan staf SBU.

### **Hasil Kuisisioner**

Pada penelitian ini, peneliti telah menyebar kuisisioner secara digital yaitu melalui pesan *whatsapp*. Kuisisioner tersebut dikirimkan ke 85 anggota INKINDO Sumatera Barat yang memiliki piutang dan telah diisi oleh 23 anggota. Kuisisioner memiliki 8 jenis pertanyaan, pertanyaan pertama adalah alasan anggota memilih organisasi INKINDO. Alasan anggota memilih organisasi INKINDO adalah untuk mempermudah Badan usaha dalam mengurus

dokumen agar bisa mengikuti proses tender dalam lingkungan pemerintah dan swasta, INKINDO juga merupakan salah satu organisasi Badan Usaha yang peduli akan kondisi anggotanya. INKINDO juga merupakan salah satu organisasi Badan Usaha yang memiliki anggota yang cukup besar untuk skala provinsi dan nasional, serta para anggota dapat bertukar informasi antar sesama konsultan.

Pertanyaan kedua adalah manfaat yang didapatkan oleh anggota setelah bergabung dengan INKINDO Sumatera Barat. Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh anggota ketika bergabung dengan INKINDO Sumatera Barat adalah mereka dapat mengetahui lebih dalam dan detail tentang ilmu dunia jasa konsultasi dibidang konstruksi dan non konstruksi. Alasan lainnya adalah anggota mendapat kemudahan dalam mengurus berbagai macam dokumen yang mendukung anggota untuk dapat mengikuti proses tender. Bergabung dengan organisasi INKINDO dapat menambah relasi antar anggota, piha pemerintah maupun swasta. Pertanyaan ketiga adalah kendala yang dihadapi anggota INKINDO Sumatera Barat yaitu, anggota mengalami beberapa kesulitan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Anggota juga merasakan adanya kesulitan dalam proses pengurusan izin yang kurang terorganisir dan kurang cepat. Alasan lainnya adalah karena kewajiban dan denda yang ditimbulkan setiap tahunnya cukup besar sehingga cukup menyulitkan anggota untuk membayar kewajiban. Anggota juga mengeluhkan kurang pedulinya anggota terhadap kemajuan organisasi. Kendala juga dirasakan oleh anggota yang berdomisili di luar kota Padang, sehingga menyulitkan mereka untuk berperan aktif di organisasi karena terkendala jarak.

Pertanyaan ke empat adalah kendala yang dihadapi anggota dalam proses pelunasan kewajiban anggota. Beberapa anggota tidak mengalami kendala dalam proses pelunasan kewajiban karena sudah merupakan kewajiban anggota terhadap organisasi. Beberapa anggota juga berpendapat bahwa kurangnya paket tender yang mereka dapatkan sehingga membuat mereka menunda pembayaran kewajiban anggota, rekapitulasi iuran yang timbul setiap tahun tidak dirincikan, nominal pembayaran kewajiban anggota dan denda lainnya dinilai cukup memberatkan jika langsung dibayarkan langsung. Pertanyaan terakhir adalah harapan anggota terhadap organisasi INKINDO Sumatera Barat. Anggota INKINDO Sumatera Barat berharap agar organisasi mengeluarkan kebijakan kepada anggota untuk dapat mencicil kewajiban dan denda yang ditimbulkan setiap tahunnya. Untuk sistem pembayaran kewajiban anggota kedepannya untuk dapat diperbaiki lagi serta kewajiban anggota yang timbul setiap tahunnya diharapkan dapat dirincikan secara jelas kepada anggota. Dan anggota juga berharap agar INKINDO Sumatera Barat memberikan keringanan kepada anggota dalam proses melunasi kewajiban mereka disetiap tahunnya.

### **Simpulan dan Saran**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab timbulnya piutang pada anggota diakibatkan beberapa hal seperti iuran tahunan anggota, kegiatan organisasi seperti Forum Anggota (FORA), Penataran Kode Etik dan Tata Laku Profesi, Musyawarah Provinsi (MUSPROV), Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) dan pelatihan atau seminar

yang diadakan organisasi, uang pangkal Badan Usaha. Dalam proses penagihan piutang anggota, INKINDO Sumatera Barat telah melakukan prosedur yang baik yaitu dengan cara menghubungi dan merekap piutang per anggota di setiap tahunnya lalu mengirimkan rekap tersebut via *whatsapp*. Jika *whatsapp* tidak direspon maka staf INKINDO Sumatera Barat akan menghubungi via telepon. anggota INKINDO Sumatera Barat mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajiban karena dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Dan kendala lainnya yang dihadapi INKINDO Sumatera Barat dalam penagihan piutang adalah ketidaktahuan anggota dengan jumlah piutang yang timbul dan kurang pedulinya anggota terhadap kewajiban yang timbul.

DPP INKINDO Sumatera Barat untuk kedepannya dapat melakukan pengelolaan piutang dengan cara *cash basis*. Ketika anggota melakukan pembayaran maka piutang akan dikurangi sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota. INKINDO Sumatera Barat sebaiknya menyediakan file terpisah yang berisikan rekap piutang Anggota INKINDO Sumatera Barat sehingga nanti akan terlihat total dari piutang dan sisa piutang tahun berjalan. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INKINDO, DPP INKINDO Sumatera Barat dapat lebih tegas memberikan sanksi kepada anggota yang belum melunasi kewajibannya selama tahun berjalan. Sanksi dapat diberikan secara bertahap dengan memberikan Surat Peringatan I hingga Surat Peringatan III. Dalam proses penagihan piutang kepada anggota INKINDO Sumatera Barat, sebaiknya DPPH langsung mengunjungi dan bertanya kepada anggota yang bersangkutan perihal kendala yang dialami oleh anggota dalam proses pelunasan kewajiban sebagai anggota.

### **Ucapan Terimakasih**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia - Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dan juga kepada orangtua, adik dan keluarga yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi dan jurnal. Bapak Hidayatul Ihsan, S. E. Ak, M. Sc, Acc, Ph. D, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Bapak Firman Surya, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi DIV Akuntansi. Ibu Josephine Sudiman, SE., M. Acc. Ak., Ph. D selaku Pembimbing I dan Ibu Lisa Amelia Herman, SE., M. Si selaku Pembimbing II. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada partner yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi dan jurnal ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

### **Referensi**

- [1] Mardiasmo. (2000). Akuntansi Keuangan Dasar Edisi 2. Yogyakarta : BPF E.
- [2] Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : IAI.
- [3] Martani, Dwi. (2012). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Jilid 1. Salemba Empat. Jakarta.

- [4] Kardiyanti, Novi Arie. (2017). Penerapan Pengendalian *Intern* Penjualan Kredit dalam Upaya Meminimalisir Piutang Tidak Tertagih pada PT. Supralita Mandiri Cabang Sidoarjo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya*.
- [5] Makaria, Beni, dkk. 2015. Evaluasi Atas Sistem Akuntansi Penjualan Kredit dan Penerimaan Kas Sebagai Upaya Meningkatkan Pengendalian *Intern* (Studi pada PT. Kasin Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 1 No. 1 Januari 2015.
- [6] Krisdayanti, Debby R, Rustam Hidayat dan Dwi Atmanto. 2018. Efektifitas Pengelolaan Piutang Untuk Meningkatkan Laba Perusahaan (Studi kasus pada PT. Nusantara Surya Sakti Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 56(1), 137-145.
- [7] Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- [8] Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan. Cetakan Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- [9] Abdul Halim. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Cetakan Pertama. YKPN. Yogyakarta.
- [10] Syakur, S. A. 2015. *Intermediate Accounting*. Jakarta: A V Publisher.
- [11] Munir. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Erlangga.
- [12] Baridwan, Z. 2008. *Sistem Akuntansi Penyusutan Prosedur dan Metode*. Edisi 12. Jakarta : Erlangga.
- [13] Naryono, E. 2020. Pengaruh Piutang Dagang Terhadap Likuiditas Perusahaan pada PT. Graha Tumarima Kota Sukabumi. In *Jurnal Keuangan*.
- [14] Veronica, D., & Jaya, H. 2018. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas dari Piutang Pada Perusahaan Jasa Ekspedisi di PT. Trans Multi Cargo. *Measurement : Jurnal AKuntansi*.
- [15] Wardianingsih, S. S. 2016. Analisis Pengelolaan Piutang Sebagai Tindak Lanjut Kebijakan Penjualan Kredit. *Ekonomi dan Kewirausahaan*.
- [16] Kieso, Donald. E, Weygandt, Jerry. J (Alih Bahasa oleh Emil Salim SE). 2012. *Intermediete Accounting*. Jilid 1, Edisi Keduabelas. Erlangga. Jakarta.
- [17] Hery. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Edisi 1, Cetakan Pertama. PT. Bumi Aksara. Jakarta.